

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Raja Grasindo.
- Arif, Bahtiar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Akademia.
- Budiarto, Astrid. 2013. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta: Genesis
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS Edisi 7*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hidayanto, Djoko. 2004. *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah*, Jakarta.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta:BPFE.
- Mardiasmo. 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Nordiawan, Dedi. 2012. *Anggaran Di Suatu Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nota Keuangan Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2011
- Reksohadiprodo, Sukanto. 2001. *Ekonomika Publik*. (Edisi Pertama). Yogyakarta: BPFE.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (cetakan kelima)*. Jakarta: Grasindo.
- Stoner, 2010. James Dan Edward Freeman (Eds), *Manajemen Jilid I*, Terj. Alexander. Sindoro, Jakarta: Pt Prahallindo,

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel, Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang :

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Jurnal :

Agus, Ellya. Safri, Muhammad. 2016. Kinerja Keuangan Daerah Dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin. *Jurnal* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univ. Jambi (<http://online.journal.unja.ac.id>, di akses tanggal 16 Juli 2020 jam 10.00 Wib)

Basariyah, Siti. 2017. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal* Magister Ekonomi Universitas Tadulako Palu. (<http://online.journal.unp.ac.id>, di akses tanggal 16 Juli 2020 jam.10.00 Wib)

Fitri, Vella Kurniasih. 2012. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2009-2012. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. (<https://www.neliti.com/id/publications/33346/>, di akses tanggal 16 Juli 2020 jam.11.00 Wib)

Harteti, Yuni; Darwanis dan Abdullah, Syukriy. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal* Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh (<http://online.journal.unsyiah.ac.id>, di akses tanggal 17 Juli 2020 jam.10.30 Wib)

Saputra, Dori. 2014. Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat. *Skripsi* Universitas Negeri Padang. (<http://journal.unp.ac.id>, di akses tanggal 17 Juli 2020 jam.12.00 Wib)